

PERAN KEWIRAUSAHAAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI EKONOMI TRANSISI

Menur Kusumaningtyas¹

M.Hatta Fahamsyah²

Sri Lestari³

STIE Mahardhika Surabaya^{1,3}

Universitas Pelita Bangsa²

Email: menur.kusumaningtyas@stiemahardhika.ac.id

ABSTRAK

Masalah kemiskinan menjadi fokus pemerintah setiap tahunnya. Dan menjadi topik utama dalam negara dengan penduduk padat seperti Indonesia. Pengentasan kemiskinan dewasa ini selain dimainkan oleh pemerintah juga digerakkan oleh lembaga amal. Sementara kewirausahaan sebagai salah satu organisasi yang membantu pengentasan kemiskinan, menjadi ketertarikan penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pengentasan kemiskinan dan kewirausahaan dengan memperluas pemahaman-mekanisme di mana proses kewirausahaan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia.

Kata kunci: Kewirausahaan, kemiskinan, inovasi, ekonomi transisi

PENDAHULUAN

Masalah ekonomi dan sosial yang nyaris tidak tertuntaskan adalah soal kemiskinan. Selain sebab membludaknya jumlah penduduk, juga diakibatkan oleh terbatasnya mata pencaharian (Misturelli & Heffernan., 2008). Namun, dekade terakhir menunjukkan beberapa hal positif prestasi dalam memerangi kemiskinan (Bruton et al., 2015). Keberhasilan tersebut tampak dari upaya wirausaha sebagai solusi efisien dalam memerangi kemiskinan di Indonesia. Wirausaha dianggap sebagai salah satu cara yang efisien untuk mencapai kemakmuran ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Karena kewirausahaan telah menciptakan lapangan kerja, yang mengarah pada pengurangan pengangguran melalui (a) individu yang terlibat dalam aktivitas kewirausahaan; (b) menciptakan pekerjaan baru melalui bisnis dengan potensi pertumbuhan tinggi (Estrin et al., 2013).

Disamping itu, meningkatnya keinginan masyarakat dalam berwirausaha, mampu menciptakan kesejahteraan karyawannya. Dalam konsep Islam, wirausaha berbasis sosial, karyawan tidak dididik untuk

mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Tetapi pada pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan (Kusumaningtyas & Putranto, 2020). Secara keseluruhan manfaat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pertumbuhan produktivitas tidak hanya diperoleh orang yang mampu secara finansial, tetapi juga bagi kaum menengah ke bawah karena pertumbuhan rata-rata bersifat netral distribusi, yaitu menguntungkan masyarakat ekonomi ke bawah secara proporsional (Dollar & Kraay, 2013).

Banyak literatur tentang pengentasan kemiskinan berfokus pada peran yang dimainkan oleh dukungan pemerintah, lembaga amal dan kewirausahaan sebagai akses pengentasan kemiskinan (Bruton et al., 2013). Indonesia adalah negara yang membuktikan sejauh mana kewirausahaan efisien dalam memerangi kemiskinan. Makalah ini membahas masalah ini secara empiris, mengeksplorasi hubungan antara kewirausahaan, pengentasan kemiskinan dalam keberhasilan ekonomi, terutama di masa pandemi ini.

TINJAUAN LITERATUR

Literatur tentang faktor penentu kemiskinan telah berkembang pesat, mencakup berbagai bidang studi, terutama didominasi oleh ekonomi pembangunan, tetapi tetap cukup langka di bidang manajemen (Bruton et al., 2013). Antara lain studi sebelumnya tentang penanggulangan kemiskinan menekankan pentingnya skema kredit mikro (Prahallad, 2005).

Sejumlah ulama membuktikan pentingnya kewirausahaan dalam mengentaskan kemiskinan (Bruton et al., 2013) karena pebisnis lebih memilih potensi usaha yang baik di wilayah padat penduduk dengan upah regional rendah. Upaya ini dilihat sebagai jalan keluar dari perbaikan standar hidup mereka (Frankish et al., 2014). Prahallad (2005) menekankan peran yang dimainkan pengusaha dalam memperbaiki kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, dan bagaimana melayani mereka hingga mencapai taraf kemakmuran.

Namun ternyata tidak hanya eksploitasi peluang pasar dengan fokus pada masyarakat menengah ke bawah yang membantu pengentasan kemiskinan, pengusaha yang berasal dari latar belakang yang sama juga dapat membantu menginspirasi orang miskin untuk terlibat dalam kewirausahaan melihatnya sebagai motivasi menuju kesuksesan (Si, S. et al., 2015).

Dinamisme kewirausahaan telah dikatakan sangat penting untuk ekonomi (Jackson, J. E. et al., 1999). Ditandai dari inisiatif swasta, sejak awal tahun 1990-an, wirausaha mengalami perubahan besar melibatkan reformasi saat mereka bergerak menuju ekonomi pasar kewirausahaan yang mengemban salah satu peran inti dalam mempengaruhi semua aspek pembangunan ekonomi (Korosteleva & Belitski., 2017).

Meskipun ada sejumlah kesulitan, termasuk ketidakstabilan ekonomi, kekurangan kelembagaan, kekurangan dukungan publik dan sikap sosial yang tidak menghendaki munculnya wirausaha, UKM

Indosarana Global yang bergerak di bidang percetakan mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini dikarenakan kebutuhan mencetak dibutuhkan semua orang dan semua jenis usaha. (Usman & Setyorini, 2019)

Lonjakan penciptaan usaha baru di ekonomi transisi sepanjang tahun 1990-an menyebabkannya hasil positif yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di seluruh wilayah. Perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam mengembangkan ekonomi pasar dalam beberapa dekade terakhir, terbukti telah membantu mengentaskan kemiskinan.

Sebagai contoh peran lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merilis potensi zakat di Indonesia mencapai 286 triliun. Sementara realisasinya hanya 3,7 triliun. Jumlah 286 triliun ini adalah 16% dari total APBN untuk alokasi kelompok miskin. Apabila jumlah total ini direalisasikan secara otomatis akan membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. (Ramtohad, 2018)

KERANGKA KONSEPTUAL

Wirausaha adalah solusi baru untuk masalah sosial yang lebih efektif dan efisien. Wirausaha berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial sementara inovasi bisnis menekankan pada pemenuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Kewirausahaan erat kaitannya dengan identifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhan sosial atau untuk menjawab tantangan sosial (Kotler, 2015). Dengan demikian, bisnis wirausaha memiliki tiga fitur utama yang melibatkan fokus pada tujuan sosial (lingkungan atau budaya), memperoleh pendapatan terutama dari kegiatan bisnis, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu di luar penciptaan kekayaan pribadi (Burkett, 2010). Namun, usaha kewirausahaan berbeda di mana yang pertama cenderung lebih condong ke tujuan keuntungan semata (Burkett, 2010). Inovasi wirausaha dapat

mengurangi kemiskinan, tantangan dalam mengadopsi inovasi dan mekanisme yang memungkinkan sektor swasta dan publik untuk bekerja sama dalam pengentasan kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Karnani (2017), inisiatif pengentasan kemiskinan harus fokus pada penciptaan lapangan kerja dalam skala besar yang cocok untuk masyarakat miskin. Berdasarkan data di 104 negara berkembang dalam studi (Karnani, 2017), negara kecil dan menengah Kontribusi sektor perusahaan (UKM, yaitu <99 karyawan) terhadap lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan sebanding dengan perusahaan besar, menunjukkan pentingnya UKM dalam menciptakan lapangan kerja. Melalui UKM, masyarakat miskin dapat menjadi produsen (tidak hanya dilihat sebagai konsumen potensial) sehingga pendapatannya dapat ditingkatkan dengan membeli dari mereka (Karnani, 2017). Oleh karena itu, diperlukan inovasi sosial yang mendukung perubahan sosial melalui kewirausahaan pada UKM untuk mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Yang terpenting, pemerintah dan lembaga sosial terkait mendorong UKM untuk memperkenalkan wirausaha yang berpotensi membawa hasil yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi seperti ini.

Di Indonesia, UKM berpotensi dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan karena mereka lebih cenderung tersebar secara geografis daripada perusahaan besar (Karnani, 2017). Dengan cara ini, wirausaha dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja skala besar bagi masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan mereka, dan meningkatkan kesetaraan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. (Karnani, 2017)

berpendapat bahwa inisiatif penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin seperti yang disebutkan di atas tetapi juga pada penyediaan layanan publik dasar atau kebutuhan bagi masyarakat miskin.

(Weyrauch & Herstatt, 2017) menyatakan bahwa karakteristik utama dari wirausaha dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan adalah pengurangan biaya substansial, konsentrasi pada fungsi inti, dan optimalisasi kinerja. Misalnya, kerajinan tas asal Tanggulangin yang dijual dengan harga murah, secara signifikan lebih murah daripada tas lokal yang sudah masuk pasar kompetitif. Fungsionalitas ini cukup untuk kondisi lokal. Dengan demikian, wirausaha ini jika didukung oleh banyak instansi dan masyarakat dapat mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

Tantangan Wirausaha

Ada tiga kendala tantangan dalam mengadopsi wirausaha Menurut Laporan Kewirausahaan Regional ASEAN 2015/2016, yaitu dukungan finansial, kebijakan pemerintah, dan kapasitas untuk berwirausaha (Xavier et al., 2016). Dalam hal dukungan finansial, wirausaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendanaan awal dan terhubung dengan calon investor (Logue et al., 2017). Selain itu, seorang pewirausaha memerlukan modal 'sabar' dengan jangka waktu yang lebih lama atau lebih fleksibel selama fase pertumbuhan karena mereka sering mengalami arus kas dan profitabilitas yang tidak stabil (Logue et al., 2017). Selain itu, dalam hal kebijakan pemerintah, instansi pemerintah diharapkan berperan besar dalam mendorong penyediaan pembiayaan bagi para pengusaha, khususnya di UKM, namun tidak berarti menghalangi investasi swasta di sektor ini (Wonglimpiyarat, 2015). Masalah yang

terkait dengan kebijakan pemerintah dipandang tidak berhasil dalam meningkatkan kemudahan berbisnis dan menyederhanakan birokrasi yang rumit (Xavier et al., 2016).

Terkait dengan kurangnya kapasitas kewirausahaan, (Logue et al., 2017) mengidentifikasi kurangnya peluang pelatihan bisnis di Indonesia. Karena itu, diperlukan peran yang lebih aktif dari universitas dan pemerintah dalam menyediakan program kewirausahaan yang dapat meningkatkan kemungkinan sukses wirausaha (Logue et al., 2017)

Mengentaskan Kemiskinan melalui Inovasi

Inovasi tidak dikembangkan oleh wirausahawan tunggal secara terpisah tetapi dibentuk melalui interaksi dari berbagai organisasi dan institusi, yang menunjukkan pentingnya sistem inovasi (Kotler, 2015). Salah satu jenis sistem inovasi regional adalah ekosistem kewirausahaan, yang terdiri dari komponen kunci seperti kumpulan besar modal investasi, organisasi pendukung, angkatan kerja dengan modal manusia yang memadai, dan budaya yang kondusif untuk inovasi. Untuk mendukung wirausaha, ekosistem wirausaha perlu memiliki keragaman dalam penyedia sumber daya, organisasi pendukung yang memadai, budaya ekosistem, dan peluang untuk pembelajaran wirausaha (Roundy, 2017). Pertama, keragaman investor yang menawarkan modal untuk wirausaha dapat mendukung pembentukan wirausaha dan meningkatkan peluang mereka untuk berhasil (Roundy, 2017). Pengusaha dapat mengakses modal dari keuangan mikro, *crowdfunding* (untuk mengumpulkan banyak kontribusi kecil dari sejumlah besar orang untuk mendanai proyek atau usaha), dan pasar untuk investasi berdampak (investasi yang dilakukan ke perusahaan, organisasi dan dana dengan tujuan untuk keduanya menghasilkan dampak positif bagi masyarakat dan mendapatkan

keuntungan finansial) (Roundy, 2017). Berdasarkan Global Impact Investor Network Report tahun 2018, industri investasi berdampak tumbuh di mana responden telah mengelola USD 228,1 miliar dalam aset investasi berdampak (Mudaliar et al., 2018). Investor yang paling berpengaruh adalah pengelola dana dan yayasan, diikuti oleh investor penting lainnya seperti bank, kantor keluarga, dan dana pensiun / perusahaan asuransi (Mudaliar et al., 2018). Dengan demikian, untuk meningkatkan kemungkinan sukses mereka, wirausahawan perlu memahami opsi yang tersedia untuk membiayai usaha sosial mereka dan cara mengakses modal tersebut. Kedua, organisasi pendukung yang berfokus pada kewirausahaan diperlukan untuk menyediakan ruang kerja bersama bagi wirausahawan sosial (memfasilitasi wirausahawan ini untuk terhubung dengan wirausaha lain), bimbingan, dan koneksi ke penyedia modal serta profesional pendukung lainnya (misalnya akuntan, pengacara, dan penasihat teknis) (Mudaliar et al., 2018). Infrastruktur pendukung juga termasuk universitas. Universitas juga dapat mendukung kewirausahaan sosial dengan menyediakan program kewirausahaan dan menciptakan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh usaha sosial. Dukungan ini penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan wirausaha sosial karena mereka sering kekurangan kapasitas wirausaha (Xavier et al., 2016). Selain itu, inovasi sosial sering kali membutuhkan serangkaian keterampilan atau kemampuan berbeda yang hampir tidak dapat dimiliki oleh wirausahawan tunggal, yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor (Kotler, 2015). Ketiga, budaya yang menumbuhkan tindakan prososial atau lebih umum perilaku altruistik dalam suatu ekosistem penting untuk menumbuhkan kewirausahaan sosial (Kotler, 2015). Pendekatan gerakan pekerjaan secara spiritual yang dikemukakan oleh (Canda, 2002) dapat bermanfaat untuk menciptakan budaya

altruistik dan dapat diterapkan dalam pendidikan kewirausahaan yang diperlukan untuk inovasi. Ia menawarkan pendekatan proaktif yang mencakup inklusivitas, penggunaan tradisi spiritual, transformasi pendidikan pekerjaan sosial, penelitian dan pengembangan teori, dan konektivitas dalam mempromosikan integrasi spiritualitas dan pekerjaan sosial. Selain itu, konten spiritual yang relevan dapat dimasukkan ke dalam semua jenis kursus dalam pendidikan pekerjaan sosial. Penelitian dan pengembangan teori perlu mengeksplorasi nilai-nilai yang berasal dari tradisi spiritual dan kitab suci untuk relevansinya dengan teori dan praktik pekerjaan sosial kontemporer. Selain itu, konektivitas global antara orang-orang yang peduli dengan kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN

Dalam mempertimbangkan lebih jauh hubungan antara kewirausahaan dan kemiskinan, tak dapat dipungkiri, wirausaha dan pengaruhnya mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan melalui UKM dan untuk menyediakan kebutuhan dasar yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Untuk mendukung wirausaha, ekosistem wirausaha akan diuntungkan dengan adanya keragaman dalam penyedia sumber daya, organisasi pendukung yang memadai dan peluang untuk pembelajaran wirausaha. Hubungan perguruan tinggi, industri dan pemerintah diharapkan dapat mendukung ekosistem kewirausahaan. Misalnya, pemerintah dapat menyediakan pendanaan awal tanpa membebani dana swasta. Wirausaha yang sudah matang dapat mengakses pendanaan dari bank komersial atau menggandeng investor.

REFERENSI

Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Si., S. (2015). Entrepreneurship, Poverty, and Asia: Moving beyond Subsistence Entrepreneurship. *Asia*

Pacific Journal of Management 32 (1): 1–22.

- Bruton, G. D., Ketchen, D. J., & Ireland, R. . (2013). Entrepreneurship A Solution to Poverty. *Journal of Business Venturing*, 28(6), 683–689.
- Burkett, I. (2010). *Financing social enterprise: understanding needs and realities*.
- Canda, E. (2002). A world-wide view on spirituality and social work: Reflections from the USA experience and suggestions for internationalization. *Currents: New Scholarship in the Human Services*, 1, 1–6.
- Dollar, D., & Kraay, A. (2013). Growth Still Is Good for the Poor. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Estrin, S., Korosteleva, J., & Mickiewicz, T. (2013). Which Institutions Encourage Entrepreneurial Growth Aspirations? *Journal of Business Venturing*, 4, 564–580.
- Frankish, J. S., Roberts, R. G., Coad, A., & Storey, D. J. (2014). Is Entrepreneurship A Route Out of Deprivation? *Regional Studies*, 48(6), 1090–1107.
- Jackson, J. E., Klich, J., & Poznanska, K. (1999). Firm Creation and Economic Transitions. *Journal of Business Venturing*, 14(5–6), 427–450.
- Karnani, A. (2017). Marketing and poverty alleviation: The perspective of the poor. *Market, Globalization & Development Review*, 2, 1–18.
- Korosteleva, J., & Belitski., M. (2017). Entrepreneurial Dynamics and Higher Education Institutions in the Post-Communist World. *Regional Studies*, 51(3), 439–453.
- Kotler, P. (2015). *Confronting capitalism: Real solutions for a troubled economic system*. . Amacom.
- Kusumaningtyas, M., & Putranto, J. (2020, May 20). Does Sharia

- Coffee Business Development Influence Employee's Welfare? *Proceedings of the Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia.*
<https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293969>
- Logue, D., Mcallister, G., & Schweitzer, J. (2017). *Social Entrepreneurship and Impact Investing Report.*
- Misturelli, F., & Heffernan., C. (2008). What is poverty? A diachronic exploration of the discourse on poverty from the 1970sto the 2000s. *The European Journal of Development Research*20, 4.
- Mudaliar, A., Bass, R., & Dithrich, H. (2018). *Annual Impact Investor Survey. Global Impact Investing Network.*
https://thegiin.org/assets/2018_GII_N_Annual_Impact_Investor_Survey_webfile.pdf
- Prahalad, C. K. (2005). *Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits.* Upper Saddle River:Wharton School Publishing.
- Ramtohad, S. (2018). Tata Kelola Keuangan Negara Madinah dan Relevansinya dengan Konteks Keindonesiaan. *El-Jizya, 6 No.2 Jul.*
- Roundy, P. (2017). Social entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. *International Journal of Social Economics, 44,* 1252–1267.
- Si, S., Yu, X., Wu, A., Chen, S., Chen, S., & Su, Y. (2015). Entrepreneurship and Poverty Reduction: A Case Study of Yiwu,China. *AsiaPacific Journal of Management, 32*(1), 119–143.
- Usman, M. N., & Setyorini, H. (2019). Pendampingan Penyusunan Strategi untuk Peningkatan Daya Saing UKM dalam Memasuki Era Digital pada CV.Indosarana Global Surabaya. *Darmabakti, 01,* 19–22.
- Weyrauch, T., & Herstatt, C. (2017). What is frugal innovation? Three defining criteria. *Journal of Frugal Innovation, 2,* 1–17.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s40669-016-0005-y>
- Wonglimpiyarat, J. (2015). Challenges of SMEs innovation and entrepreneurial financing. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 11,* 295–311.
- Xavier, S. R., Sidin, M., S., Guelich, U., & Nawangpalupi, C. (2016). *ASEAN Regional Entrepreneurship Report 2015/2016.* International Development Research Centre.
<https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/56932>